TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2012-2014 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

KODE	PROGRAM/	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA		TARGET		Unit
	KEGIATAN			2012	2013	2014	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PROGRAM : PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI		Terdapat dalam Indikator KinerjaTujuan terkait				
	DEPUTI BIDANG PROGRAM DAN REFORMASI BIROKRASI	Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi nasional secara terencana, sistematis, dan komprehensif	Terdapat dalam Indikator Kinerja Sasaran terkait				
2845	Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara	Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan	Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang terukur sesuai dengan kebijakan RB Nasional	85%	90%	95%	Asdep Perumusan
	dan Reformasi Birokrasi	PAN dan RB	Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan	6 kebijakan	3 Kebijakan	3 Kebijakan	Kebijakan Program
			Dokumen Isu Pokok Program PAN dan RB dalam rangka Perumusan Rancangan Kebijakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	PAN dan RB
			Updating data base Kebijakan, Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Program PAN dan RB	100%	100%	100%	
			Jumlah Dokumen Perencanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1
			Jumlah Pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi untuk Pemerintah Daerah	1 kebijakan	1 Pedoman	1 Pedoman	1
			Jumlah laporan pelaksanaan tugas Tim Independen	1 Laporan	1 laporan	1 Laporan	†
			Jumlah kebijakan tentang Penyempurnaan Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	-	1 Kebijakan	1 Kebijakan	
			Jumlah Sistem Aplikasi PMPRB yang Disempurnakan	-	1 Sistem (update)	1 Sistem (update)	
			Jumlah Manual Sistem Aplikasi PMPRB yang Disempurnakan	1 Pedoman	1 Pedoman (update)	1 Pedoman	
2833	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pusat	Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan PAN dan RB pada Pemerintah	Jumlah K/L yang melaksanakan kebijakan program PAN dan RB sesuai dengan sasaran pembangunan nasional	20 K/L	100% (76 K/L)	40 K/L	Asdep Koordinasi Pelaksanaan
		Pusat	Persentase K/L yang mengikuti FORTEKPAN	80%	90%	100%	Kebijakan
			Jumlah K/L dan Pemda yang mengikuti Forum	76 K/L, 33 Prov	76 K/L, 33 Prov	76 K/L, 33 Prov	PAN dan RB
			Knowledge Management	10.77.7	(Jan-Des)	(Jan-Des)	Pusat
			Jumlah K/L yang mengikuti Workshop Change Management	10 K/L	10 K/L	10 K/L	
			Jumlah Perpres Tunjangan Kinerja untuk K/L (yang telah diproses pada tahun 2011)	-	Perpres 40 K/L	-	
			Jumlah laporan pemantapan pelaksanaan koordinasi Program PAN dan RB Pusat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
			Jumlah peserta yang mengikuti Reform Leaders Academy (diadakan bersama LAN)	3000 peserta	500 peserta	500 peserta	1

KODE	PROGRAM/	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA		TARGET		Unit
	KEGIATAN			2012	2013	2014	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Persentase K/L yang telah melaksanakan RB	80% K/L	100% K/L	100% K/L	
2834	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Meningkatnya efektifitas	Jumlah Pemda yang melaksanakan kebijakan program	33 Prov	100 Kab	100 Kab	Asdep
	Pendayagunaan Aparatur Negara	koordinasi kebijakan PAN	PAN dan RB sesuai dengan sasaran pembangunan	33 Kab	35 Kota	35 Kota	Koordinasi
	dan Reformasi Birokrasi Daerah	dan RB pada Pemerintah	nasional	33 Kota			Pelaksanaan
		Daerah	Jumlah Pemda yang mengikuti	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	Kebijakan
			FORKOMPANDA	250 Kab/Kota	260 Kab/Kota	270 Kab/Kota	PAN dan RB
			Jumlah asistensi Reformasi Birokrasi kepada instansi daerah	40% Pemda	45% Pemda	50% Pemda	Pusat
			Jumlah pemda yang mengikuti workshop Reformasi	186 Kab/Kota	300 Kab/kota	100% Prov	1
			Reformasi Birokrasi			100% Pemprov	
			Jumlah laporan pemantapan pelaksanaan koordinasi	1 laporan	1 laporan	1 laporan	7
			Program PAN dan RB Daerah				
			Persentase Pemda yang telah melaksanakan RB	100% Prov	100% Prov	100% Prov	7
				10% Kab/Kota	30% Kab/Kota	60% Kab/Kota	
2839	Pelaksanaan Pemantauan dan	Meningkatnya efektifitas	Jumlah Laporan monev Program PAN dan RB		5 laporan	6 Laporan	Asdep
	Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan	pemantauan dan evaluasi	Persentase K/L (yang disetujui untuk program	100% K/L	76 K/L	76 K/L	Pemantauan dar
	Aparatur Negara dan Reformasi	kebijakan PAN dan RB	RBN yang menerapkan Penilaian Mandiri	(36 K/L yang	(100%)	(100%)	Evaluasi
	Birokrasi Pusat	pada Pemerintah Pusat	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	RBN)			Program PAN
			Jumlah Assessor PMPRB K/L	=	100 orang	100 orang	dan RB Pusat
			Jumlah peserta Workshop Penerapan PMPRB di Pusat	=	100 orang	100 orang]
			Jumlah K/L yang diberi asistensi Penerapan PMPRB	-	76 K/L	76 K/L	1
					(100%)	(100%)	
			Jumlah K/L yang dinilai untuk pelaksanaan RB	40 K/L	lanjutan	-	1
					Carry Over		
			Persentase K/L yang mengikuti Capacity Building dalam rangka penerapan PMPRB	100% K/L	100% K/L	-	
2842	Pelaksanaan Pemantauan dan	Meningkatnya efektifitas	Jumlah Provinsi/Kab./Kota yang dijadikan	3 Prov/Kab/	3 Prov/Kab/	3 Prov/Kab/	Asdep
	Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan	pemantauan dan evaluasi	baseline pemetaan	Kota	Kota	Kota	Pemantauan dar
	Aparatur Negara dan Reformasi	kebijakan PAN dan RB	Jumlah Provinsi/Kab./Kota yang dimonitor	3 Prov/Kab/	33 Prov,33 Kab	33 Prov,75 Kab	Evaluasi
	Birokrasi Daerah	pada Pemerintah Daerah	dan dievaluasi dengan PMPRB	Kota	33 Kota	44 Kota	Program PAN
			Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi Program PAN dan RB	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	dan RB Daerah
			Jumlah Assessor Pemda	400 orang	200 Orang	200 Orang	7
			Jumlah Peserta Workshop PMPRB Online	100 orang	100 orang	100 orang	7
			Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang diberikan asistensi	-	33 Provinsi	-	7
			pelaksanaan PMPRB		66 kab/kota	132 kab/kota	
			Jumlah Pemda yang dipetakan pelaksanaan program	5 Pemda	5 Pemda	5 Pemda	7
			PAN dan RB-nya				
			Pelaksanaan Gerakan Nasional Reformasi	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	1
			Birokrasi yang Bersih, Kompeten, dan Melayani				<u> </u>
			Jumlah pedoman penilaian pelaksanan RB Daerah	1 pedoman	-	-	1
			Jumlah kebijakan penetapan RB Daerah	1 kebijakan	-	-	7
			Persentase Pemda (yang disetujui untuk program	-	33 Prov	33 Prov	1
			RBN yang menerapkan Penilaian Mandiri		33 Kab	90 Kab	
			Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		33 Kota	33 Kota	

KODE	PROGRAM/	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA		TARGET		Unit
	KEGIATAN			2012	2013	2014	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Persentase Pemda yang mengikuti Capacity Building	100% Prov	100% Prov	100% Prov	
			dalam rangka penerapan PMPRB	10% Kab/Kota	30% Kab/Kota	60% Kab/Kota	
В	DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN	pemerintah yang proporsional efektif dan efisien	Terdapat dalam Indikator Kinerja Sasaran terkait				
2840	Pengembangan Kebijakan, dan Evaluasi Program Kelembagaan	Terwujudnya perumusan kebijakan dan program	Persentase LNS yang telah tertata organisasi tata kerjanya	50% (10 K/L)	85%	100%	Adep Perumusan
		di bidang kelembagaan	Jumlah UPT Eselon II-nya dievaluasi	15 K/L	20	20	Kebijakan
		tepat sasaran	Persentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata kelembagaannya	50% (5 K/L)	85%	100%	Kelembagaan
			Jumlah Kebijakan Mengenai Kelembagaan Instansi Vertikal	2 Perpres	-	-	
			Jumlah Kebijakan Mengenai Kelembagaan Mengenai UPT	1 PermenPAN dan RB	-	-	1
			Jumlah kebijakan mengenai pedoman evaluasi/audit organisasi	1 PermenPAN dan RB	1 PermenPAN dan RB	-	1
			Jumlah kebijakan mengenai pedoman penataan organisasi	1 PermenPAN dan RB	1 PermenPAN dan RB	-	1
			Jumlah kebijakan mengenai monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi organisasi pemerintah	1 PermenPAN dan RB	-	-	
2823	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Politik, Hukum dan	Terwujudnya kelembagaan Polhukkam yang proporsional, efektif dan	Persentase kementerian negara dan Polhukkam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	50% (5 K/L)	85%	100%	Asdep Kelembagaan Politik
	Keamanan	efisien	Persentase LPNK bidang Polhukkam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	50% (5 K/L)	85%	100%	Hukum dan Keamana
			Persentase sekretariat lembaga negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	50% (5 K/L)	85%	100%	1
			Jumlah instansi pemerintah bidang polhukkam yang melakukan penataan organisasi berdasarkan tepat fungsi dan tepat ukuran	10 K/L	10 K/L	4 K/L	
			Jumlah instansi pemerintah bidang polhukkam yang dievaluasi efisiensi organisasinya	5 K/L	5 K/L	5 K/L	1
2821	Kegiatan Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian I	Terwujudnya kelembagaan Perekonomian I yang proporsional, efektif dan	Persentase kementerian negara bidang Perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	50% (5 K/L)	85%	100%	Asdep Kelembagaan Perekonomiar
		efisien	Persentase LPNK bidang Perekonomian yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	50% (5 K/L)	85%	100%	
			Persentase perwakilan RI yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	50% (5 Perwakilan)	85%	100%	
		Ju ya	Jumlah instansi pemerintah bidang perekonomian I yang melakukan penataan organisasi berdasarkan tepat fungsi dan tepat ukuran	10 K/L	10 K/L	4 K/L	
			Jumlah instansi pemerintah bidang perekonomian I yang dievaluasi efisiensi organisasinya	5 K/L	5 K/L	5 K/L	1

KODE	PROGRAM/	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA		TARGET		Unit
	KEGIATAN			2012	2013	2014	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	· /			(-)	(-7		(=)
2822	Dangamhan aan Vahiialaan	Terwujudnya kelembagaan	Dougontosa Iramantanian nagana hidana	500/ (5 V/L)	85%	100%	Aadam
2022	Pengembangan Kebijakan,		Persentase kementerian negara bidang	50% (5 K/L)	83%	100%	Asdep
	Koordinasi dan Evaluasi	Perekonomian II yang	Perekonomian II yang telah tertata organisasi				Kelembagaan
	Kelembagaan Perekonomian II	proporsional, efektif dan	dan tata kerjanya			400-	Perekonomian II
		efisien	Persentase LPNK Bidang Perekonomian II	50% (5 K/L)	85%	100%	
			yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya				
			Laporan Hasil Evaluasi Tugas, Fungsi dan Susunan	1 SE Men. PAN	-	-	
			Organisasi Kementerian PAN dan RB, LAN, BKN	dan RB			
			BPKP dan ANRI				
			Jumlah kebijakan tentang Penataan Kelembagaan	1 Per. Men. PAN	-	-	
			Kementerian PAN dan RB, LAN, BKN, BPKP	dan RB			
			dan ANRI				
			Terbitnya kebijakan tentang penguatan fungsi	1 SE Men. PAN	-	-	
			supervisi dan pengendalian PNBP dalam rangka	dan RB			
			mewujudkan mekanisme dan sistem pengawasan atas				
			PNBP pada setiap K/L				
			Jumlah instansi pemerintah bidang perekonomian II	10 K/L	10 K/L	4 K/L	
			yang melakukan penataan organisasi berdasarkan				
			tepat fungsi dan tepat ukuran				
			Jumlah instansi pemerintah bidang perekonomian II	5 K/L	5 K/L	5 K/L	
			yang dievaluasi efisiensi organisasinya				
2820	Pengembangan Kebijakan,	Terwujudnya kelembagaan	Persentase Kementerian Negara bidang	50% (5 K/L)	85%	100%	Asdep
	Koordinasi dan Evaluasi	Kesejahteraan Rakyat yang	Kesra telah tertata organisasi dan tata	0070 (0 11 1)			Kelembagaan
	Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat	proporsional, efektif dan	kerjanya				Kesejahteraan
	Troisinguai Trosejanteraan Ttanijat	efisien	Persentase LPNK bidang Kesra yang telah	50% (5 K/L)	85%	100%	Rakyat
		Chisten	tertata organisasi dan tata kerjanya	3070 (3 IEE)	0570	10070	runyur
			Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi	50%	85%	100%	1
			dan tata kerjanya (Hasil Pementauan dan	3070	0370	10070	
			Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah)				
			Evaluasi Reiemoagaan i emerintan Daeran)				
			Jumlah instansi pemerintah bidang Kesra	10 K/L	10 K/L	4 K/L	
			yang melakukan penataan organisasi berdasarkan				
			tepat fungsi dan tepat ukuran				
			Persentase kelembagaan Pemda yang telah dipantau	33 Prov, 33 Kab	33 Prov, 33 Kab	33 Prov, 33 Kab	
			dan dievaluasi organisasi dan tata kerjanya	33 Kota	33 Kota	33 Kota	
С	DEPUTI BIDANG SDM APARATUR	Terwujudnya SDM Aparatur	Terdapat dalam Indikator Kinerja Sasaran terkait				
		yang profesional, berkinerja,					
		akuntabel dan sejahtera					
2843	Pelaksanaan Koordinasi dan Evaluasi	Meningkatnya hasil	Persentase jumlah kebijakan SDM Aparatur	20%	60%	80%	Asdep
	Sistem Manajemen SDM Aparatur	perencanaan, evaluasi, dan	yang dilakukan evaluasi	2070	0070	0070	Koordinasi
	Sistem Managemen SDM Aparatur	pengelolaan data SDM	Jumlah data SDM Aparatur Instansi Pusat	50% (Pusat)	70% (Pusat)	_	dan Evaluasi
		Aparatur	dan Daerah yang diolah	20% (Pusat) 20% (Daerah)	25% (Daerah)	_	Sistem
		Aparatur	Jumlah instansi yang diberikan sosialisasi PP				Sistem
				20%	50%	-	
			tentang PTT (Pegawai Tidak Tetap)			1	

KODE	PROGRAM/	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA		TARGET		Unit
	KEGIATAN			2012	2013	2014	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Persentase instansi yang melakukan implementasi Sistem data base SDM Aparatur	75%	80%	-	
			Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan SDM Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	-	1
			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil rekruitmen CPNS	1 laporan	1 Laporan	-	
			Jumlah laporan publikasi evaluasi pelaksanaan sistem rotasi dan promosi PNS	1 laporan	1 Laporan	-	
			Jumlah K/L dan Pemda yang mempublikasikan proses rekruitmen CPNS pada websitenya yang terintegrasi dengan website Kementerian PAN dan RB	40 K/L, 33 Prov, 33 Kab dan 33 Kota	36 K/L 50 Kab dan 50 Kota	-	
			Tersedianya laporan mengenai pengawasan seleksi dan promosi bagi aparat penegak hukum	1 laporan	1 Laporan	-	_
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (RPP tentang Pegawai Tidak Tetap (PTT)	1 PP	Sosialisasi (10 instansi pusat 10 prov)	-	
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (RPP tentang Tenaga Honorer (Penyelesaian Tenaga Honorer)	1 PP	1 Laporan	-	
			Jumlah Sistem pengelolaan Data Support System SDM Aparatur	1 Sistem	pengolahan data 1 Laporan	-	
			Peraturan tentang mekanisme pengaduan masyarakat dalam proses rekruitmen CPNS (dilaksanakan bersama Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur)	1 PermenPAN dan RB	Sosialisasi dan evaluasi 1 Laporan	-	
			Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan laporan monitoring dan evaluasi redistribusi/realokasi PNS	1 laporan	1 Laporan	-	
			Persentase tenaga honorer yang telah dilakukan verifikasi	100%	-	-	
			Persentase tingkat aplikasi data formasi nasional	100%	-	-	
			Evaluasi Pendidikan Kedinasan Aparatur Jumlah laporan hasil koordinasi, verifikasi dan validasi	1 laporan 1 laporan	-	-	
	Pengembangan Kebijakan Perencanaan dan Pengadaan SDM	Terwujudnya perencanaan dan pengadaan SDM	Data Tenaga Honorer Persentase instansi yang diberikan sosialisasi PP tentang Pengadaan/PP tentang Formasi	10%	30%	50%	Asdep Perencanaan
	Aparatur	Aparatur yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan organisasi	Persentase instansi pemerintah yang mengirimkan data usulan formasi PNS secara tepat dan akurat	80%	100%	-	SDM Aparatur
			Laporan mengenai kebutuhan PNS Nasional (524 instansi daerah dan 75 instansi pusat)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
			Persentase instansi yang dilakukan evaluasi kebijakan pengadaan PNSnya	10%	40%	50%	
			Jumlah kebijakan bidang SDM Aparatur (RPP tentang Formasi PNS dan RPP tentang Rekruitmen/Pengadaan PNS	2 RPP	sosialisasi 10%	-	
			Jumlah K/L dan Pemda yang menyusun perencanaan	40 K/L, 33 Prov,	36 K/L,	-	

KODE	PROGRAM/	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA		TARGET		Unit
	KEGIATAN			2012	2013	2014	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kebutuhan pegawai dan melakukan penataan PNS	33 Kab dan	50 Kab dan		
			sesuai aturan	33 Kota	50 kota		
			Jumlah K/L dan Pemda yang mengirimkan data usulan	40 K/L, 33 Prov,	36 K/L,	-	\exists
			formasi PNS secara tepat dan akurat	33 Kab dan	50 Kab dan 50 Kota		
			Jumlah K/L dan Pemda yang telah melakukan analisis	40 K/L, 33 Prov,	36 K/L,	-	
			jabatan dan beban kerja	33 Kab dan	50 Kab dan 50 Kota		
			Jumlah Kebijakan SDM Aparatur (Kebijakan CAT	1 kebijakan	sosialisasi	-	
			Computer Assisted Test untuk seleksi CPNS				
			Terbitnya peraturan tentang Sistem Rekruitmen CPNS	1 PermenPAN	sosialisasi	-	
			di K/L secara on-line				
			Jumlah kebijakan bidang SDM Aparatur (Kebijakan	1 Per. Men. PAN	-	-	
			Penetapan Lowongan Jabatan yang dikecualikan	dan RB			
			Jumlah SDM Tenaga Analis Jabatan (ANJAB) di K/L	4125 orang	-	-	7
			dan Pemda yang dilatih				
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (Per. Men. PAN dan	1 Per. Men. PAN	-	-	
			RB tentang Penataan dan Pengadaan Penyidik PNS	dan RB			
			bekerjasama dengan BPKP				
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur tentang Penetapan	Per. Men. PAN	-	-	
			standar jabatan pada setiap instansi	dan RB			
			Jumlah Naskah Kerjasama dengan Konsorsium PTN	1 Naskah	-	-	\exists
			yang disiapkan dalam rangka pelaksanaan Seleksi				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Moratorium PNS	1 laporan	-	-	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Seleksi CPNS	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
			Jumlah Laporan Pengaduan Pengadaan CPNS	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
2837	Pengembangan Kebijakan	Terwujudnya pengembangan	Tersusunnya (RUU) kebijakan tentang	1 RUU	1 UU/ PP	Sosialisasi	Asdep
	Pemantapan Pengembangan SDM	karir SDM Aparatur yang	kepegawaian negara (ASN) dan PP pelaksanaannya		Pelaksanaan		Pengembangan
	Aparatur	fair dan akuntabel	Jumlah instansi yang dibina terkait dengan	20 Instansi	15 instansi	-	SDM Aparatur
			penataan jabatan				
			Jumlah instansi pusat dan daerah yang	10 (Pusat)	15 (Pusat)	-	
			tersosialisasikan kebijakan tentang Penilaian	10 (Daerah)	15 (Daerah)		
			Prestasi Kerja, Penilaian Pengangkatan,				
			Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan				
			Dari Jabatan Struktural, Pola Dasar Karir,				
			dan Kebijakan Pengembangan lainnya				
			Jumlah Instansi Pemerintah yang menerapkan	10 (Pusat)	15 instansi	20 instansi	
			SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) berdasarkan PP No. 46	10 (Daerah)			
			/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS				
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (RPP mengenai	1 RPP	sosialisasi	-	
			Pengisian (Rotasi/Promosi) dalam jabatan secara		15 instansi		
			terbuka (Revisi PP No. 100/2000 jo PP No.13/2002)				
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (RPP mengenai	1 RPP	sosialisasi	-	
			Pengukuran Kinerja Pegawai		15 instansi		
-							
							+
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (RPP mengenai	1 RPP	sosialisasi	-	
			Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)				

KODE	PROGRAM/	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA		TARGET		Unit
	KEGIATAN			2012	2013	2014	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Aparatur berbasis sertifikasi keahlian (Revisi PP No.101/2000)				
			Jumlah K/L dan Pemda yang telah melaksanakan promosi Jabatan secara terbuka untuk pejabat Eselon I dan II di K/L dan Pemda	40 K/L, 33 Prov 33 Kab, 33 Kota	20 K/L, 10 prov 10 kab dan 10 kota	-	
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (Per. Men. PAN dan RB tentang Penetapan Jabatan Fungsional Khusus (yang baru terbentuk perinstansi yang ditetapkan)	1 Per.Men. PAN dan RB	Per.Men.PAN dan RB		
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (RPerpres) tentang tentang Beasiswa Tugas Belajar Luar Negeri dan Dalam Negeri bagi Aparatur Negara	1 RPerpres			
			Revitalisasi Sistem Nasional Assessment Center (NAC) untuk rekruitmen, pelatihan dan promosi Jabatan Aparatur Negara	1 Sistem NAC dalam Rperpres penilaian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian			
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (Per. Men. PAN dan RB tentang Penataan Jabatan Struktural Eselon III ke bawah ke dalam Jabatan Fungsional bersama Deputi Bidang Kelembagaan	1 Per. Men. PAN dan RB			
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (Per. Men. PAN dan RB tentang Penetapan Standar Kompetensi Jabatan	1 Rancangan 1 Per.Men. PAN dan RB			
			Jumlah instansi pemerintah yang sudah memiliki Standar Kompetensi dan persyaratan jabatan	10 instansi	15 instansi		
			Jumlah laporan hasil sosialisasi dan uji coba kebijakan Standar Kompetensi PNS pada seluruh K/L dan Pemda	1 laporan			
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (RPerpres tentang Pola Dasar Karir PNS	1 Perpres			
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (Per. Men. PAN dan RB tentang Sertifikasi Kompetensi Profesi	1 Per.Men. PAN dan RB			
			Persentase IP yang melakukan evaluasi kinerja Individu	50%	75%	100%	1
			Persentase PNS per instansi pemerintah sesuai PP yang telah memiliki sertifikat kompetensi	50%	60%	70%	
			Jumlah instansi pemerintah yang telah melakukan analisis kebutuhan diklat	10 (Pusat) 10 (Daerah)	15 instansi	20 instansi	
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (Pedoman tentang Penetapan Standarisasi Jabatan struktural	1 Per.Men. PAN			
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (Pedoman tentang Penetapan Standarisasi Jabatan fungsional	1 Per.Men. PAN			
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (Revisi Per. Men. PAN dan RB tentang Jabatan Widyaiswara	1 Per.Men. PAN			

KODE	PROGRAM/	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA		TARGET		Unit
	KEGIATAN			2012	2013	2014	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Jumlah Widyaiswara/tenaga pengajar/instruktur yang dilakukan peningkatan kualitasnya	100 orang	200 orang	500 orang	
2832	Pengembangan Kebijakan Penegakan Integritas SDM Aparatur	Terwujudnya Penegakan Integritas SDM Aparatur yang fair dan akuntabel	Jumlah instansi yang tersosialisasikan PP tentang disiplin, PP tentang Larangan PNS menjadi anggota parpol, dan Peraturan Kode Etik PNS	30 Instansi	30 Instansi	30 Instansi	Asdep Penegakan Integritas
			Jumlah instansi yang tersosialisasikan PP tentang Diklat Jabatan PNS	30 Instansi	30 Instansi	30 Instansi	SDM Aparatu
			Jumlah instansi yang tersosialisasikan PP tentang Penyempurnaan PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS	30 Instansi	30 Instansi	30 Instansi	
			Jumlah K/L dan Pemda yang telah melaksanakan	40 K/L, 33 Prov	36 K/L		
			penegakan kode etik sesuai aturan	33 Kab, 33 Kota	50 Kab dan 50 Kota		
			Jumlah K/L dan Pemda yang telah melaksanakan	40 K/L, 33 Prov	36 K/L		+
			penegakan displin sesuai aturan	33 Kab, 33 Kota	50 Kab dan 50 Kota		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan penegakan kode etik dan disiplin PNS	1 Laporan	1 Laporan		
			Persentase instansi pemerintah yang jumlah pelanggaran konflik kepentingannya turun	10%	10%	10%	
			Persentase instansi pemerintah yang jumlah pelanggaran disiplin dan etikanya turun	10%	10%	10%	
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur (SE.Men PAN dan RB tentang Larangan Bagi PNS untuk menjalankan Unit Usahan	1 SE.Men. PAN dan RB			
2824	Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan SDM Aparatur	Terwujudnya kesejahteraan SDM Aparatur yang fair dan	Jumlah kebijakan tentang Sistem Remunerasi SDM Aparatur Negara	1 RPP	1 RUU/1 RPP		Asdep Kesejahteraar
		akuntabel	Jumlah kebijakan tentang Gaji/Tunjangan PNS/TNI/ Polri	5 PP	5 PP	5 PP	SDM Aparatu
			Jumlah K/L dan Pemda yang telah melakukan	40 K/L, 33 Prov	36 K/L		
			penataan jabatan PNS sesuai aturan	33 Kab, 33 Kota	50 Kab dan 50 Kota		
			Jumlah K/L dan Pemda yang telah melakukan	40 K/L, 33 Prov	36 K/L		
			pemeringkatan jabatan sesuai aturan	33 Kab, 33 Kota	50 Kab dan 50 Kota		
			Laporan Evaluasi Pembobotan Jabatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	_
			Jumlah kebijakan tentang Sistem Asuransi PNS dan Peningkatan Penerimaan Manfaat Asuransi Kesehatan	1 RPP	1 RPP	Sosialisasi	
			Jumlah kebijakan tentang Sistem Pengelolaan Dana Pensiun PNS	1 RPP	Sosialisasi		1
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur tentang Pemberian Pensiun Dini secara Sukarela	1 Per. Men. PAN	Sosialisasi		
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur tentang Perpres Perpres Sosialisasi tentang Penggajian Berbasis Kinerja (perinstansi RB)				
			Jumlah instansi pemerintah yang telah melakukan		20 pusat		
			pemeringkatan jabatan		50 daerah		ĺ

KODE	PROGRAM/	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA		TARGET		Unit
	KEGIATAN			2012	2013	2014	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Persentase tingkat penyusunan standarisasi		20 pusat		
			peringkat jabatan bagi PNS		50 daerah		
			Persentase instansi yang menyusun informasi		20 pusat		
			jabatan dalam rangka penyusunan sistem remunerasi		50 daerah		
			berdasarkan merit system				
			Jumlah kebijakan SDM Aparatur tentang Sistem dan	1 Per. Men. PAN	Sosialisasi		
			anggaran untuk SDM yang mengundurkan diri				
			khususnya yang kompetensinya tidak sesuai dengan				
			kebutuhan organisasi				
D	DEPUTI BIDANG TATA LAKSANA	Terwujudnya	Terdapat dalam Indikator Kinerja Sasaran terkait				
		penyelenggaraan tata laksana					
		pemerintah yang efisien,					
		efektif dan akuntabel					
2849	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi	Meningkatnya efektifitas	Jumlah peraturan/kebijakan (RUU tentang Tata	1 UU	1 RUU (bahas	1 UU dan 1 PP	Asdep
	dan Evaluasi Tata Hubungan	pelaksanaan tata hubungan	Hubungan)		DPR)		Tata Hubungan
	Penyelenggaraan Pemerintahan	penyelenggaraan	Jumlah peraturan/kebijakan (UU dan PP	1 UU dan 1 PP	Sosialisasi	Sosialisasi lanjutan	Penyelenggaraa
		pemerintahan	Pelaksanaan UU tentang Administrasi Pemerintahan)		(5 Regional)	J	Pemerintahan
			Jumlah peraturan/kebijakan (UU dan PP	1 RUU dan 1 RPP	1 RUU (bahas	1 UU dan 1 PP	1
			Pelaksanaan UU tentang Etika Penyelenggara Negara		DPR)		
			Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tata	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	İ
			Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah				
2846	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi	Meningkatnya efektifitas	Persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi	_	35% Pusat	50 % Pusat	Asdep
2040	dan Evaluasi tata laksana administrasi	pelaksanaan tata laksana	pedoman umum penamaan, singkatan, dan akronim		15% Daerah	30 % Daerah	Pengembangan
	umum	administrasi umum	seluruh instansi pemerintah		1370 Dacian	30 % Daciali	Sistem
	umum	administrasi umum	Persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi	_	85% Pusat	90 % Pusat	administrasi
			pedoman umum Tata Naskah Dinas		30% Daerah	50 % Daerah	umum
			Persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi	40% (Pusat)	70% (Pusat)	90 % Pusat	Pemerintahan
			pedoman umum aspek-aspek transformasi kehumasan	20 % (Daerah)	45%(Daerah)	60 % Daerah	1 emermanan
			Jumlah peraturan/kebijakan (Pedoman	20 % (Daciali)	1 Pedoman	Sosialisasi	1
			Government Resources Management System/Sistem	_	(Per. Men. PAN)	50814118481	
			Manajemen Sumber Daya Pemerintah		(I ci. Mcii. I Aiv)		
			Jumlah Pedoman Umum Konseptualisasi Kehumasan	_	5 Pedoman	Sosialisasi	1
			Jumlah pedoman yang memuat penamaan,	1 pedoman	3 i edoman	50814118481	1
			singkatan, dan akronim seluruh instansi pemerintah	1 pedoman			
			Jumlah pedoman umum tentang Tata Naskah Dinas	1 pedoman			Ì
			Naskah Dinas	1 pedoman			
			Jumlah pedoman tentang aspek-aspek transformasi	2 pedoman			Ì
			Kehumasan	2 pedoman			
			Jumlah pedoman umum Sistem Administrasi	1 pedoman			Ì
			Pemerintahan	1 podoman			
			Jumlah peraturan/kebijakan (Perpres tentang	1 Perpres			t
			Government Resources Management System)	1 1 cipies			
			Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan	-	10%	20%	t
			Government Resources Management System)		1070	2070	
			Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Government	_	10%	20%	
		1	Juman aporan evaluasi pelaksahaan Governmeni		1070	2070	1

KODE	PROGRAM/	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA		TARGET		Unit
	KEGIATAN			2012	2013	2014	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2847	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Standarisasi Sarana dan	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penggunaan sarana	Persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi kebijakan tata laksana sarana dan prasarana kerja	50% Pusat 10% Daerah	75% Pusat 25% Daerah	100% Pusat 50% Daerah	Asdep Standardisasi
	Prasarana Aparatur	dan prasarana aparatur	aparatur Persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi Perpres mengenai pengadaan dan pemanfaatan kendaraan dinas dan fasilitas dinas dalam rangka efisiensi keuangan negara	-	50% Pusat 25% Daerah	100% Pusat 50% Daerah	Sarana dan Prasarana
			Jumlah laporan hasil impelementasi kebijakan tata laksana sarana dan prasarana kerja aparatur	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
			Perpres mengenai pengadaan dan pemanfaatan kendaraan dinas dan fasilitas dinas dalam rangka efisiensi keuangan negara	1 Perpres			
			Pedoman pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja aparatur	1 Pedoman			
2848	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Sistem dan Prosedur	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan prosedur	Persentase instansi pemerintah pusat/pemda yang menerapkan SOP	100% (pusat) 15% (daerah)	100% (pusat) 25% (daerah)	100%	Asdep Pengembangan
	Pemerintahan	pemerintahan	Persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi PP tentang Pedoman Umum Tata Laksana Izin, Dispensasi dan Konsesi	-	100% (pusat) 15% (daerah)	100% (pusat) 20% (daerah)	Sistem dan Prosedur Pemerintahan
			Persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi Perpres Perjalanan Dinas Aparatur dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran	-	100% (pusat) 15% (daerah)	100% (pusat) 20% (daerah)	
			Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Pedoman Analisis Penataan Tata Laksana (Pelayanan Publik dan Pemerintahan)	1 Per.MenPAN dan RB	1 Pedoman	1 Pedoman	
			Persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Pedoman Analisis Penataan Tata Laksana (Pelayanan Publik dan Pemerintahan)	-	100% (pusat) 15% (daerah)	100% (pusat) 20% (daerah)	
			Pedoman Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	-	1 Pedoman	Sosialisasi	1
			Pedoman Penataan Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah	-	1 Pedoman	Sosialisasi	
			Jumlah peraturan RPP tentang Pedoman Umum Tata Laksana Izin, Dispensasi dan Konsesi	1 RPP			1
			Perpres Perjalanan Dinas Aparatur dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran	1 Perpres			
	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Program Tata Laksana	Terwujudnya perencanaan, pemantauan dan evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yg disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Asdep Pemantauan
		program/kegiatan bidang Tata Laksana	Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Tata Laksana (Pedoman Evaluasi Ketatalaksanaan Pemerintah) Jumlah instansi pemerintah (K/L dan Pemda) yang	1 Pedoman 40 K/L, 33 Prov	100% pusat 30% Daerah 40 K/L,	100 Pusat 50% Daerah 250 Kab/	dan Evaluasi Ketatalaksana
			melakukan penataan ketatalaksanaan dengan baik Jumlah peraturan/kebijakan (RUU tentang Badan	33 Kab, 33 Kota	150 Kab/Kota	Kota	
			Jumlah peraturan/kebijakan (RUU tentang Badan Layanan Umum)	1 UU	1 UU	Sosialisasi	

KODE	PROGRAM/	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA		TARGET	2013 2014	
	KEGIATAN			2012	2013	2014	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan	40 K/L, 33 Prov,	40 K/L,	300 Kab/	
			Government Resources Management System pada	33 Kab, 33 Kota	150 Kab/Kota	Kota	
			K/L dan Pemda (khususnya E-Procurement)				
			Jumlah instansi pemerintah (K/L dan Pemda) yang	-	100% (Pusat)	100% (Pusat)	1
			disosialisasi (Pedoman Evaluasi Ketatalaksanaan)		30% (Daerah)	30% (Daerah)	
			Inventarisasi pemanfaatan teknologi informasi dan	1 Laporan	0 0 7 0 (= 0.000.00)	00,0 (200000)	†
			komunikasi (e-Government) dalam proses bisnis	Laporan			
			instansi pemerintahan pusat				
			Jumlah laporan inventarisasi pemanfaatan teknologi	1 laporan hasil			+
			informasi dan Komunikasi (E-government) dalam	inventarisasi			
			proses bisnis pemerintah daerah	mventarisasi			
E	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN	Terwujudnya	Terdapat dalam Indikator Kinerja Sasaran terkait				
E		3 2	Terdapat dalam mulkator Kmerja Sasaran terkait				
	DAN AKUNTABILITAS APARATUR	1 7 00					
		pengawasan intern					
		pemerintah yang terintegrasi,					
		efisien dan efektif					
		Terwujudnya					
		instansi pemerintah					
		yang akuntabel					
		dan berkinerja tinggi					
2835	Pengembangan Kebijakan Sistem	Meningkatnya efektifitas	Jumlah peraturan/kebijakan di bidang	3 PermenPAN	3 PermenPAN	3 PermenPAN	Asdep
	Pengawasan dan Akuntabilitas	sistem pengawasan dan	akuntabilitas kinerja				Pengembangan
	Kinerja Aparatur	akuntabilitas kinerja aparatur	Jumlah pedoman/modul di bidang akuntabilitas	2 pedoman/	2 pedoman/	2 pedoman/	Sistem
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	anamus minerja aparacar	kineria	modul	modul	modul	Pengawasan
			Database pemetaan penerapan sistem AKIP	1 database	1 database	1 database	dan
			Jumlah dokumen laporan bidang pengawasan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	Akuntabilitas
			dan akuntabilitas	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	7 Kumuomus
			Jumlah peraturan/kebijakan di bidang akuntabilitas		1 RUU	1 RUU	
			Kinerja (RUU tentang Akuntabilitas Kinerja		1 KOO	1 KOO	
			Penyelenggara Negara)				
2830	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi	Meningkatnya kualitas dan	Jumlah peraturan/kebijakan di bidang	1 RUU	1 RUU	Sosialisasi/	Asdep
2030	dan Evaluasi Sistem Pengawasan	implementasi Sistem	pengawasan (RUU tentang Pengendalian	1 KCC	1 KOO	peraturan	Pengembangan
	Intern Pemerintah	Pengendalian Intern	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan)			pelaksanaan	Sistem
	Intern Temerman	pemerintahan	Jumlah peraturan/kebijakan di bidang	1 PermenPAN	1 PermenPAN	1 PermenPAN	Pengawasan
		pemermanan			dan RB		Internal
			pengawasan (standar audit)	dan RB		dan RB 50 K/L, 33 Prov	
			Jumlah instansi yang telah melaksanakan KESA	40 K/L, 33 Prov	40 K/L, 33 Prov	· ·	Pemerintah
			(Kode Etik Standar Audit) dan Kendali Mutu	33 Kab, 33 Kota	33 Kab, 33 Kota	200 Kab/Kota	_
			Jumlah APIP yang melaporkan hasil	40 K/L, 33 Prov	40 K/L, 33 Prov	50 K/L, 33 Prov	
			pengawasan	33 Kab, 33 Kota	33 Kab, 33 Kota	200 Kab/Kota	_
			Persentase instansi pemerintah yang	60% Pusat	60% Pusat	70% Pusat	
			melaksanakan SPI sesuai dengan ketentuan	33 Prov, 33 Kab	33 Prov, 33 Kab	33 Prov	
				33 Kota	33 Kota	200 Kab/Kota	
			Persentase APIP yang telah melakukan pemantauan	80% Pusat dan	85% Pusat ,	90% Pusat	
			TLHP fungsional	33 Prov, 33 Kab	33 Prov, 33 Kab	33 Prov	
	1	1	LILAH TURESIORAL	I DO FIOV. DO NAD	JJ FIOV, JJ Nad	33 PIOV	i e

KODE	PROGRAM/	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA		TARGET		Unit
	KEGIATAN			2012	2013	2014	Organisas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				33 Kota	33 Kota	200 Kab/Kota	
			Persentase instansi yang telah diberikan sosialisasi	60% Pusat	75 % Pusat	90 % Pusat	1
			LHP APIP	30% Daerah	30% Daerah	30% Daerah	
			Jumlah K/L dan Pemda yang diberi sosialisasi tentang	80 K/L	75 K/L	75 K/L	1
			kebijakan pengawasan	12 Provinsi	12 Provinsi	33 Provinsi	
			Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan kebijakan tentang Rekruitmen APIP Pusat dan Daerah	1 kebijakan			1
			Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan kebijakan tentang Penguatan Peran APIP Pusat dan Daerah dalam pengawasan dan pencegahan Korupsi	1 kebijakan	1 kebijakan		
			Jumlah peraturan/kebijakan di bidang	1 SE. Men. PAN			+
			pengawasan (SE. Men. PAN dan RB tentang	dan RB			
			Konfirmasi kepada PPATK dalam promosi jabatan	uan KD			
831	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi	Meningkatnya efektifitas	Persentase instansi pemerintah yang	75%	77%	90%	Asdep
	dan Evaluasi Pengawasan Masyarakat	pencegahan korupsi dan	melaksanakan dan melaporkan Inpres	1 3 70	1 1 70	JU70	Pengawasan
	Dan Pemberantasan Korupsi	pengaduan masyarakat	Percepatan Pemberantasan Korupsi yang				Masyarakat
	Dan Femoerantasan Korupsi	pengaduan masyarakat	dievaluasi sesuai pedoman				dan
			Persentase laporan dumas yang disalurkan dan	75%	80%	85%	Pemberantas
				/5%	80%	85%	
			telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah	400/	420/	450/	Korupsi
			Persentase instansi peserta model <i>Island of</i>	40%	42%	45%	
			Integrity yang berhasil	1000 77.7			4
			Terlaksananya penandatanganan Pakta Integritas	100% K/L			
			oleh seluruh K/L dan Pemda dengan BPKP, BPK, KPK	33 Prov.			
			(untuk K/L), kejaksaan dan Polri (untuk Pemda)	330 Kab/Kota	167 Kab/Kota	-	
			serta CSO setempat yang bergerak di Bidang Anti				
			Korupsi				_
			Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas integritas K/L maupun Pemda terkait	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
			Persentase LHKPN yang terkini dari pejabat minimal	80%	85%	90%	
			eselon II dan/atau pos-pos strategis yang menempati				
			jabatan baru atau selesai menjabat				
			Pelaksanaan dan pemantauan penjatuhan sanksi	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
			administrasi oleh K/L bagi pejabat minimal eselon II	(Periodik)			
			dan/atau pos-pos strategis yang tidak melaporkan				
			LHKPN terkini				
			Jumlah K/L dan Pemda yang telah menetapkan Zona	40 K/L	27 K/L	33 K/L	
			integritas	33 Prov, 33 Kab	50 Kab	50 Kab	
				33 Kota	35 Kota	35 Kota	
			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	1 laporan	1 laporan	1 laporan	7
			pemberantasan korupsi dalam aspek Pencegahan	=	=	_	
			sesuai dengan Inpres No. 5/2004, Inpres No. 9/2010 dan Inpres No. 17/2011				
			Persentase Aparatur Sipil yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	5% (total) ASN	15% (total) ASN	30% (total)	7

KODE	PROGRAM/	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA		TARGET		Unit
	KEGIATAN			2012	2013	2014	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	· ·	, ,	(LHK ASN)	Periodik	` '	` ` `	(-7
			Jumlah kebijakan terkait dengan LHKPN	1 SE. Men. PAN			
			J	dan RB			
			Jumlah kebijakan tentang penjatuhan sanksi	1 kebijakan			-
			administrasi oleh K/L bagi pejabat minimal eselon II	1 Kebijakan			
			dan/atau pos-pos strategis yang tidak melaporkan				
			LHKPN terkini				
			Jumlah peraturan/kebijakan di bidang	1 PermenPAN			
			pengawasan (Per. Men. PAN dan RB tentang	dan RB			
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pakta Integritas				
			Jumlah peraturan/kebijakan di bidang	1 PermenPAN			7
			pengawasan (Per. Men. PAN dan RB tentang	dan RB			
			Pedoman Pembangunan Zona Integritas				
			Jumlah modul instrumen pencegahan korupsi sesuai	1 Paket			
			dengan Inpres No. 17/2011				
			Jumlah peraturan/kebijakan di bidang	1 PermenPAN			
			pengawasan (Per. Men. PAN dan RB tentang	dan RB			
			Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara				
			(LHK ASN)				
			Peraturan tentang mekanisme pengaduan masyarakat	1 PermenPAN			
			dalam proses rekruitmen CPNS (dilaksanakan bersama	dan RB			
			Deputi SDM Aparatur)				
			Jumlah peraturan/kebijakan di bidang	1 kebijakan			
			pengawasan (kebijakan tentang Pengembangan	1 neorganan			
			Sistem Whistle Blower				
			Jumlah peraturan/kebijakan di bidang	1 PermenPAN			
			pengawasan (Per. Men. PAN dan RB tentang	dan RB			
				uan Kb			
829	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Meningkatnya akuntabilitas	Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Persentase instansi pusat yang menerapkan sistem	80%	90%	95%	Asdep
829			akuntabilitas kinerja	80%	90%	95%	1
	Akuntabilitas Kinerja Aparatur	kinerja instansi pemerintah	Persentase instansi pusat yang akuntabilitas	700/	0.50/	000/	Pemantauan dan Evaluasi
	Pemerintah Pusat	pusat		70%	85%	90%	
			kinerjanya baik	1.1	1.1	4.1	Akuntabilitas
			Penerbitan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Kinerja
			(LKjPP)	200/	5001	7 00/	Aparatur
			Persentase instansi yang diberi sosialisasi,	30%	60%	70%	Pemerintah
			bimtek, pelatihan/pendampingan (pusat)				Pusat
			Persentase instansi yang menyusun IKU (pusat)	40%	75%	90%	_
			Persentase LAKIP yang diterima (pusat)	100%	100%	100%	4
			Persentase PK yang diterima (pusat)	100%	100%	100%	
			Jumlah laporan hasil evaluasi pusat	82 laporan	82 laporan	82 laporan	_
			Jumlah instansi pemerintah pusat yang menyusun IKU	40 K/L	82 K/L	82 K/L	
_			Jumlah instansi pemerintah pusat yang mengikuti desimenasi SAKIP	50 IP	60 IP	70 IP	
			Jumlah instansi pemerintah pusat yang mengikuti	50 IP	60 IP	70 IP	

KODE	PROGRAM/	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA		TARGET		Unit
	KEGIATAN			2012	2013	2014	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			desimenasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal				
			Persentase instansi pusat yang diberikan layanan	85%	90%	100%	Ī
			bimbingan/asistensi akuntabilitas kinerja				
			Jumlah laporan berkala internal yang disusun	5 laporan	5 laporan	5 laporan	1
			Persentase instansi pemerintah pusat yang	80% K/L	82 % K/L	85% K/L	1
			menyerahkan IKU				
2828	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Meningkatnya akuntabilitas	Persentase instansi daerah yang menerapkan sistem	60%	70%	80%	Asdep
	Akuntabilitas Kinerja Aparatur	kinerja instansi pemerintah	akuntabilitas kinerja				Pemantauan
	Pemerintah Daerah	daerah	Jumlah instansi daerah yang akuntabilitas	33 Prov, 33 Kab	33 Prov, 33 Kab	33 Prov, 40 Kab	dan Evaluasi
			kinerjanya baik	33 Kota	33 Kota	40 Kota	Akuntabilitas
			Persentase instansi yang diberi sosialisasi,	17%	25%	30%	Kinerja
			bimtek, pelatihan/pendampingan (Daerah				Aparatur
			Persentase instansi yang menyusun IKU (Daerah)	20%	40%	50%	Pemerintah
			Persentase LAKIP yang diterima (Daerah)	100% Prov	100% Prov	100% Prov	Daerah
				90% Kab/Kota	92% Kab/Kota	95% Kab/Kota	
			Persentase PK yang diterima (Daerah)	100% Prov	100% Prov	100% Prov	1
				70% Kab/Kota	72% Kab/Kota	75% Kab/Kota	
			Jumlah laporan hasil evaluasi daerah	66 laporan	66 laporan	70 laporan	1
			Jumlah instansi pemerintah daerah yang menyusun	33 Prov, 33 Kab	33 Prov, 33 Kab	33 Prov, 40 Kab	1
			IKU	33 Kota	33 Kota	40 Kota	
			Jumlah instansi pemerintah daerah yang mengikuti desimenasi SAKIP	3 Prov	4 Prov	3 Prov	
			Jumlah instansi pemerintah daerah yang mengikuti	3 Prov	4 Prov	3 Prov	†
			desimenasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal				
			Persentase instansi daerah yang diberikan layanan	85%	85%	85%	†
			bimbingan/asistensi akuntabilitas kinerja				
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Nasional	1 LHEN	1 LHEN	1 LHEN	†
			Persentase instansi pemerintah daerah yang	40% Pemda	45% Pemda	50% Pemda	†
			menyerahkan IKU				
F	DEPUTI BIDANG PELAYANAN	Terwujudnya kualitas	Terdapat dalam Indikator Kinerja Sasaran terkait				
	PUBLIK	pelayanan publik prima, cepat	J. S. J. S.				
		pasti, murah, transparan					
		adil, patut dan memuaskan					
2841	Pengembangan Kebijakan dan	Meningkatnya dukungan	Persentase Provinsi yang diberi sosialisasi	80%	90%	100%	Asdep
	Evaluasi Program Pelayanan Publik	program peningkatan	Persentase Instansi Pusat yang diberi sosialisasi	100%	100%	100%	Perumusan
		kualitas pelayanan publik	Persentase Implementasi Instansi Pusat dan	30% Pusat	50% (Pusat)	100% Pusat	Kebijakan
		F F	Daerah	30% Daerah	50% (Daerah)	100% Daerah	Pelayanan
			Terdiseminasikannya Undang-Undang Pelayanan	100% (pusat)	-	-	Publik
			Publik dan peraturan pelaksanaannya ke seluruh	80% (Provinsi)	100% Provinsi	100% Provinsi	
			K/L dan Pemda	0070 (110111151)	10070 110 111151	(Lanjutan)	
			Terpublikasinya hasil evaluasi/penilaian terhadap	1 laporan	1 laporan	1 laporan	†
				1 Iaporan	т тароган	тароган	
			pelaksanaan pelayanan publik pada penyelenggara			1	
			terpilih yang sangat strategis				
			Laporan pemeringkatan penyelenggara pelayanan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	
			publik seluruh K/L dan Pemda			<u> </u>	1
			Peraturan pemerintah untuk pelaksanaan	1 PP			Ī

KODE	PROGRAM/	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA		TARGET		Unit
	KEGIATAN			2012	2013	2014	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik				
			Tersedianya instrumen pemantauan dan evaluasi/	1 Instrumen			
			penilaian penyelenggaraan pelayanan publik				
			Jumlah kebijakan untuk pelaksanaan	2	2	1	1
			UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik				
			Jumlah kebijakan bidang pelayanan publik tentang	1	1		İ
			pelayanan publik berbasis TIK (Open Government				
			System)				_
			Persentase instansi pemerintah yang menerapkan	5%	10%		
			pelayanan publik berbasis TIK (<i>Open Government</i>	370	1070		
			System)				
2825	Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi	Terlaksananya	Jumlah kabupaten/kota yang mempresentasikan	33 Kabupaten	33 Kabupaten	33 Kabupaten	Asdep
		penyederhanaan sistem dan	kepuasan pelanggan berdasarkan IKM	*	/Kota	*	Pelayanan Kesejahteraan Sosial
	Kesejahteraan Sosial pro		Skor IKM Rata-Rata Unit Pelayanan	/Kota	75	/Kota 85	
		prosedur pelayanan publik		70	· -		
		sosial	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan evaluasi	26		26 kab/kota yg	
			dampak Pemberian Penghargaan Citra Bhakti Abdi			dinilai thn 2006-	
			Negara (CBAN)		2009	2009	1
			Buku kumpulan program dan pengembangan inovasi	1 Buku	1 Buku	1 Buku	
			pelayanan publik di pemerintah daerah				1
			Jumlah pemda yang menyepakati rencana replikasi	33 kab/kota	33 kab/kota	33 kab/kota	
			inovasi pelayanan publik				1
		Jumlah laporan pengawasan atas pelaksanaan	1 laporan	1 laporan	1 laporan		
		keterbukaan informasi publik (UU No.14/2008) oleh	(Desember)				
			K/L dan Pemda dalam Pelayanan Publik				
2827	Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi	Terlaksananya	Jumlah helpdesk	6 helpdesk	8 helpdesk	8 helpdesk	Asdep
	Pelayanan Publik di Bidang	Penyederhananaan sistem		pada PTSP	pada PTSP	pada PTSP	Pelayanan Perekonomian
	Perekonomian	dan prosedur pelayanan	Persentase kasus perijinan yang diselesaikan dari	80%	80%	80%	
		publik di bidang ekonomi	kasus yang diterima				
		dan bisnis	Presentase Pemda yang menerapkan OSS	80%	100%	-	1
			(Pelayanan Terpadu Satu Pintu)				
			Jumlah Pemda yang melaksanakan PTSP secara	33 Prov, 33 Kab	33 Kab	33 Kab	†
			menyeluruh dan efektif dalam pelayanan publik	33 Kota	33 Kota	33 Kota	
			monyerurun dan erentin dalam perayanan puomi	33 11000	(lainnya)	(lainnya)	
			Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional	1 Sistem	(minifu)	(miniyu)	†
			(National Public Service Complaint Handling	1 Sistem			
			Mechanism) dan No wrong door policy dalam				
			pelayanan publik				
			Jumlah kebijakan bidang pelayanan publik tentang	1 kebijakan			†
			(No wrong door policy)	т кенјакан			
			HIVO WEORD AOOF DOHCVI	I	1	I	1
				i	100/	2007	
			Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan kebijakan (No wrong door polic)		10%	20%	

KODE	PROGRAM/	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA		TARGET		Unit	
	KEGIATAN			2012	2013	2014	Organisas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Pelayanan Publik di Bidang	Penyederhanaan sistem	pedoman peningkatan kualitas pelayanan		(Lainnya)	(Lainnya)	Pelayanan	
	Pemerintahan Umum, Hukum dan	dan prosedur pelayanan	publik berbasis pertisipasi masyarakat				Pemerintahan	
	Keamanan	publik di Bidang	Jumlah unit pelayanan yang menerapkan	15 unit	70 Unit	80 Unit	Umum,	
		Pemerintahan Umum,	pedoman peningkatan kualitas pelayanan		(Lainnya)	(Lainnya)	Hukum	
		Hukum dan Keamanan	publik berbasis pertisipasi masyarakat		•		dan Keamana	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan peningkatan	5 Kab/Kota	10 Kab/Kota	15 Kab/Kota		
			kualitas pelayanan berbasis sistem manajemen mutu		(Lainnya)	(Lainnya)		
			internasional					
			Jumlah laporan pelaksanaan penanganan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
			pengaduan masyarakat berbasis pusat pengaduan	1	(Desember)	(Desember)		
			pelayanan publik nasional		(,	()		
			Jumlah kebijakan bidang pelayanan publik tentang		1 kebijakan			
			(National Public Service Complaint Handling		3			
			system yang terintegrasi					
			Persentase instansi pemerintah yang disosialisasikan		100%			
			kebijakan (<i>National Public Service Complaint</i>		10070			
			Handling System)					
			Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan		5%	10%		
			kebijakan (<i>National Public Service Complaint</i>		-,-			
			Handling System)					
836	Pengembangan Sistem dan	Meningkatnya perbaikan	Jumlah unit pelayanan model uji coba	20 unit	35 unit	50 unit	Asdep	
	Standarisasi Pelayanan Publik	sistem pelayanan dan	Jumlah unit pelayanan/Pemda pemerintah	250 unit	300 Pemda	350 unit	Pengembanga	
	j	penerapan standar	yang dinilai kinerja pelayanannya	pelayanan	98 Pemkot	pelayanan	dan	
		pelayanan publik	berdasarkan usulan instansi/pemerintah	1		1	Standardisasi	
		r	pemerintah pusat dan daerah				Pelayanan	
			persentase unit pelayanan publik	70%	75%	80%	1	
			yang berkategori baik sesuai penilaian					
			persentase unit pelayanan publik	70%	80%	90%		
			yang berkategori terbaik sesuai penilaian					
			Terbitnya peraturan tentang Monitoring dan Evaluasi	-	1 Per. Men.	Uji Coba	1	
			Penerapan Standar Pelayanan		PAN dan RB	,		
			Jumlah K/L dan Pemda sebagai pilot project dalam	3 K/L (BPN,	5 K/L	10 K/L		
			peningkatan kualitas pelayanan melalui penerapan	Ditjen Imigrasi,	33 Kab	33 Kab		
			standar pelayanan berdasarkan UU No.25/2009	Kemenakertrans)	33 Kota			
			tentang Pelayanan Publik	33 Prov, 33 Kab	(Lainnya)			
			Terbitnya peraturan tentang Juknis Standar Pelayanan	1 Per.Men. PAN				
			Publik (Per.Men. PAN dan RB tentang Juknis	RB				
			Standar Pelayanan Publik)					
			Invaled instanci nomovintal Ct. 1	20 mp	70 IDD	Calumit Dani		
			Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan Standar Pelayanan Pelayanan Publik dan maklumat pelayanan	20 IPP 99 Pemda	70 IPP 165 Pemda	Seluruh Pemda K/L		
			Jumlah K/L dan Pemerintah Daerah yang dinilai	75 K/L	98 Kota	199 Kab	+	
	1		Pannan IV L dan i emerintan Daeran yang dililai	13 N/L	20 Kota	122 IXaU	1	

KODE	PROGRAM/	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA		TARGET		Unit	
	KEGIATAN			2012	2013	2014	Organisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
II	Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB		Terdapat dalam Indikator KinerjaTujuan terkait					
G	SEKRETARIAT KEMENTERIAN	Terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian	Terdapat dalam Indikator Kinerja Sasaran terkait					
2816	Pembinaan dan Pelayanan	Terwujudnya peningkatan	Persentase dokumen administrasi	100%	100%	100%	Biro Umum	
	Perkantoran, Keuangan dan	kinerja pengelolaan	perkantoran yang diselesaikan tepat waktu					
	Kepegawaian	pelayanan perkantoran, keuangan dan kepegawaian	Persentase penyelesaian pengembangan sistem administrasi perkantoran yang dilakukan	100%	100%	100%		
			Persentase dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%		
				Persentase dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	
			Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	100%	100%	100%		
			Persentase pegawai Kementerian PAN dan RB yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional dan kursus lainnya	100%	100%	100%		
			Persentase barang milik negara yang tercatat/terinventarisasi sesuai kaidah	100%	100%	100%		
			pencatatan BMN					
			Persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN	100%	100%	100%		
			Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan sesuai aturan	100%	100%	100%		
		Per	Persentase pelanggaran disiplin yang mendapatkan sanksi sesuai aturan	100%	100%	100%	7	
			Jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai yang terukur		4 unit kerja	3 unit kerja		
			Asessment kompetensi pejabat eselon II. III, dan IV di Internal Kementerian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
		Jumlah SDM yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) berbasis kompetensi (executive education) di internal Kementerian Seleksi jabatan secara terbuka untuk eselon I dan II di Kementerian PAN dan RB, LAN, BKN, BPKP dan ANRI	pelatihan (diklat) berbasis kompetensi (executive	150 orang	100 orang	50 orang		
			Seleksi jabatan secara terbuka untuk eselon I dan II di Kementerian PAN dan RB, LAN, BKN, BPKP dan ANRI	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Jumlah Sistem Aplikasi Rekruitmen Online CPNS yang transparan	1 Sistem				
			Jumlah Sistem Penilaian Kinerja Pegawai yang terukur yang disiapkan	1 Sistem				
			SK Penetapan Pemangku Jabatan Fungsional	1 SK				

KODE	PROGRAM/	OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR KINERJA TARGET		Unit			
	KEGIATAN			2012	2013	2014	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Analis Kebijakan Internal Kementerian				
			Jumlah dokumen Analisis Jabatan (Anjab)	1 dokumen			
			di Lingkungan Kementerian PAN dan RB				
			Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)	1 Simpeg			
			yang dikembangkan				
			Persentase pejabat yang telah memenuhi standar	100%	100%	100%	
			kompetensi jabatan				
			Persentase pejabat fungsional yang telah mengikuti	10%	15%	20%	
			diklat sebanyak 10% dari waktu kerja setahun				
			Persentase penurunan pegawai yang melakukan	10%	10%	10%	
			pelanggaran disiplin dan etika				
			Peraturan pegawai yang memperoleh nilai SKI Baik	60%	70%	80%	
			Persentase pengisian jabatan secara terbuka	10%	20%	30%	
			Jumlah kebijakan tentang instrumen pemberian	1 kebijakan			
			penghargaan bagi pegawai berprestasi				
2815	Pembinaan dan Pengelolaan	Terwujudnya peningkatan	Persentase dokumen program dan anggaran	100%	100%	100%	Biro
	perencanaan, penganggaran,	kualitas pelayanan internal	yang diselesaikan tepat waktu				Perencanaan
	kerjasama lembaga dan pelaporan	perencanaan/penganggaran,	Persentase dokumen pemantauan dan evaluasi	100%	100%	100%	
		kerjasama, pengembangan	program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu				
		sistem dan penyusunan	Persentase dokumen bahan kebijakan yang	100%	100%	100%	
		laporan kebijakan PAN	diselesaikan tepat waktu				
			Persentase dokumen pelaporan yang	100%	100%	100%	
			diselesaikan tepat waktu				
			Persentase rapat koordinasi perencanaan, pemantauan	100%	100%	100%	
			dan evaluasi program dan anggaran yang				
			dilaksanakan tepat waktu				
			persentase kegiatan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	
			sesuai dokumen perencanaan				
			Jumlah kerjasama bilateral maupun	5 kerjasama	5 kerjasama	5 kerjasama	
			multilateral yang difasilitasi				
			Evaluasi Organisasi (Organizational Structure	1 Laporan	1 Laporan		
			Assessment) Kementerian PAN dan RB				
			Unit kerja yang telah menerapkan SOP di Kementerian	8 Unit	8 Unit		
			PAN dan RB				
			Jumlah Pedoman Evaluasi SOP di Kementerian	1 Pedoman			
			PAN dan RB				
			Jumlah Dokumen Penyempurnaan Renstra	1 Dokumen			
			Kementerian PAN dan RB				
			Tingkat kesesuaian organisasi dengan kebutuhan	100%	100%	100%	1
			organisasi				
2814	Pengelolaan dan Pembinaan Hukum,	Tewujudnya peningkatan	Persentase dokumen kehumasan yang	100%	100%	100%	Biro Hukum
	Hubungan Masyarakat dan	kualitas pelayanan hukum,	diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	dan Humas
	Pencitraan Lembaga	kehumasan dan pencitraan	Jumlah dialog kebijakan PAN yang	10 kali	5 kali	5 kali	uan riumas
	renemaan Lembaga	lembaga	dilaksanakan	10 Kan	3 Kan	3 Kan	
	1	iembaga	Persentase publikasi/pemberitaan tentang	100%	100%		

KODE	PROGRAM/	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET		Unit	
	KEGIATAN			2012	2013	2014	Organisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			kebijakan PAN yang dilaksanakan					
			Persentase dokumentasi kebijakan PAN	100%	100%	100%		
			dikumpulkan					
			Persentase dokumen perpustakaan yang dikumpulkan	100%	100%	100%		
			Persentase penyelesaian pengembangan	100%	100%	100%		
			sistem informasi yang dilaksanakan					
			Persentase penyiapan sistem e-procurement	100%	100%			
			Persentase pengadaan dengan sistem e-procurement		100%	100%		
			Menginventarisasi dan mengintegrasikan Peraturan	100%	100%	80%		
			perundang-undangan yang ditetapkan Menteri					
			Persentase proses penyusunan peraturan perundang-	100%	100%			
			undangan yang dilaksanakan sesuai prosedur					
			Jumlah pedoman penyusunan peraturan	1 kumpulan	1 Pedoman			
			perundang-undangan yang disempurnakan	Pedoman				
			Terbentuknya Aplikasi Sistem Interkoneksi JDIH	1 Aplikasi	Aplikasi			
			Jumlah dokumen grand Design system informasi	1 dokumen	1 dokumen			
			yang disusun					
			Jumlah Aplikasi Penerapan System IT terpadu	3 Aplikasi	3 Apllikasi		†	
			dalam Government Resources Management System	o ripinuor	5 1 p			
			Tingkat Persepsi Masyarakat Terhadap Gerakan	Baik	Baik		_	
			Reformasi Birokrasi Nasional	Buik	Dunk			
			Tingkat Persepsi Masyarakat Terhadap Kementerian	60%	75%	90%		
			PAN dan RB	0070	7370	7070		
			Rasio Pemenuhan kebutuhan terhadap sistem TIK	50%	75%	100%		
			PAN dan RB	3070	7570	10070		
			Jumlah Survei Persepsi Masyarakat	1	2	2	_	
			Jumlah Pencitraan melalui Media	7	10	15	-	
Н	INSPEKTORAT KEMENTERIAN		Juman I chertaan melalui Wedia	,	10	13		
	Pembinaan dan Pengawasan Intern	Terwujudnya peningkatan	Jumlah unit kerja yang berhasil mencapai	4 unit kerja	5 unit kerja	6 unit kerja	Inspektur	
2017	dan Quality Assurance	kualitas pengawasan intern	target kinerja yang ditetapkan	4 unit Kerja	5 unit Kerja	o unit kerja	inspektui	
	dan Quanty Assurance	pelaksanaan tugas	Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PAN dan RB	Kategori 'B'	Kategori 'A'	Kategori 'AA'		
		Kementerian	Jumlah unit kerja yang mendapat nilai	4 unit kerja	6 unit kerja	7 unit kerja	_	
		Kementerian	akuntabilitas kinerja minimal kategori B	4 unit kerja	o unit kerja	/ unit kerja		
			Jumlah unit kerja yang bersih dari penyimpangan	4 unit kerja	6 unit Ironio	7 unit kerja	_	
			pengelolaan keuangan yang material	4 unit kerja	6 unit kerja	/ unit kerja		
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	_	
			Jumlah unit kerja yang bersih dari pennyimpangan				_	
				7 unit kerja	7 unit kerja	7 unit kerja		
			pengelolaan aset yang materiil	050/ (D. 11.)	050/	000/		
			Nilai Hasil Penilaian TQA terhadap pelaksanaan RBI	85% (Baik)	85%	90%		
			Parcentace rekomendaci audit kayangan yang	100%	100%	100%		
			Persentase rekomendasi audit keuangan yang	100%	100%	100%		
			ditindaklanjuti	1000/	1000/	1000/	+	
			Persentase rekomendasi audit keuangan yang	100%	100%	100%		
			ditindaklanjuti Persentase tingkat capaian kinerja	050/	000/	050/	4	
	1		rersemase ungkat capaian kinerja	85%	90%	95%	1	

KODE	PROGRAM/	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA		TARGET		Unit
	KEGIATAN			2012	2013	2014	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Nilai Hasil Penilaian PMPRB pelaksanaan RBI	70%	75%	80%	
I	STAF AHLI KEMENTERIAN	Terwujudnya Dukungan Perumusan Kebijakan PAN dan RB					
2818	Pelaksanaan Dukungan Perumusan Kebijakan PAN dan RB	Terwujudnya Dukungan Perumusan Kebijakan	Persentase jumlah kampanye budaya kerja melalui workshop/sosialisasi/media cetak dan elektronik	70%	80%	100%	Staf Ahli Kementerian
	Bidang PAN	Bidang PAN dan RB	Jumlah instansi Pemerintah yang menjadi Pilot Project Pengembangan Budaya Kerja	2 IP	5 IP	7 IP	
			Persentase laporan telaahan dukungan penyelesaian Permasalahan bidang Sistem Manajemen Pemerintah	100%	100%	100%	
			Persentase laporan dukungan perumusan kebijakan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	100%	100%	
			Persentase laporan dukungan perumusan kebijakan bidang hukum	100%	100%	100%	
			Persentase laporan dukungan perumusan kebijakan bidang kebijakan publik	100%	100%	100%	
III	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian PAN dan RB		Terdapat dalam Indikator KinerjaTujuan terkait				
J	SEKRETARIAT KEMENTERIAN		Terdapat dalam Indikator Kinerja Sasaran terkait				
2819	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kementerian	Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana internal dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian	Rasio sarana dan prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik	90%	100%	100%	Biro Umum

KODE	PROGRAM/	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Unit
	KEGIATAN			2012	2013	2014	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

KODE	PROGRAM/	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Unit
	KEGIATAN			2012	2013	2014	Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)